

**KENDALA SATLANTAS POLRES PADANG PARIAMAN
DALAM MENANGGULANGI BALAPAN LIAR DI KAWASAN
KANTOR BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



**Oleh:
AFDHAL LUKMANA
1201804/2012**

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

**KENDALA SATLANTAS POLRES PADANG PARIAMAN
DALAM MENANGGULANGI BALAPAN LIAR DI KAWASAN
KANTOR BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:
AFDHAL LUKMANA
1201804/2012

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

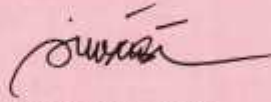
**Kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Balapan
Liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman**

Nama : Afdhal Lukmana
BP/NIM : 2012/1206075
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2017

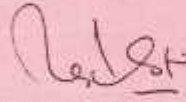
Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Junaidi, S.Pd., M.Si
NIP. 19680622 199403 1 002

Dosen Pembimbing II



Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si
NIP. 19790515 200604 2 003



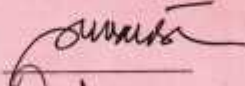
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 02 Februari 2017

Kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Balapan
Liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Nama : Afdhal Lukmana
BP/NIM : 2012/1201804
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2017

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Junaidi, S.Pd., M.Si	
2. Sekretaris	: Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si	
3. Anggota	: Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si	
4. Anggota	: Erda Fitriani, S.Sos., M.Si	
5. Anggota	: Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

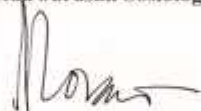
Nama : Afdhal Lukmana
NIM/BP : 1201804/2012
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman"** adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2017

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Sosiologi



Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan



Afdhal Lukmana
NIM. 1201804/2012

ABSTRAK

Afdhal Lukmana. (1201804/2012). Kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang 2017.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku remaja yang melakukan aktivitas balapan liar di depan kantor pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Aktivitas ini rutin dilakukan setiap akhir pekan. Peneliti tertarik akan hal tersebut dan mendapatkan data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus balapan liar yang tertangkap razia pada dua tahun terakhir. Selaku pihak yang berwenang Satlantas Polres Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka tersebut tetapi tidak mencapai hasil yang maksimal. Hal ini berdampak pada meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Anomie yang dikemukakan oleh Robert King Merton. Asumsi dasar Teori Anomie Merton adalah tentang penyimpangan akan terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur karena adanya pembagian kelas. Dalam perkembangan anomie diakibatkan adanya pemisahan dan pembagian antara tujuan-tujuan budaya dan kemampuan para anggota dan mengalami perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Dalam teori ini terdapat lima reaksi orang terhadap tujuan budaya dan cara yang diterima yaitu *konformitas*, *innovator*, *ritualism*, *retreatism* dan *rebellion*.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan *purposive sampling* yang berjumlah 40 orang yang kriterianya adalah anggota Satlantas berjumlah 12 orang ditambah 1 orang anggota Polres Padang Pariaman, 11 orang pembalap liar, 8 orang jumlah keluarga pembalap liar dan 7 orang jumlah masyarakat yang dijadikan informan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman dengan langkah-langkah reduksi data, display data, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Satlantas dalam menanggulangi balapan liar yaitu (1) area yang luas untuk balapan liar, (2) tidak adanya program khusus, (3) kebocoran informasi razia, (4) keterbatasan jumlah personil Satlantas dalam melakukan razia, dan (5) hubungan dengan masyarakat yang longgar.

Keyword: Kendala, Balapan Liar, Pelanggaran Lalu Lintas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman”. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di samping itu, penelitian ini juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini terelialisasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, yang pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

Teristimewa kepada Ayahanda Akhirman Tanjung dan Ibunda Arlia Mursida tercinta, dan kakakku yang tersayang Sherly Rahayu dan Arief Firdaus serta keempat adikku Khairul Annas, Aulia Afitatul Aini, Jannatul Hillal dan Ifdhil Muhammad Fajar. Kemudian seluruh keluarga yang telah memberikan

dukungan moril dan materil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada pembimbing I (satu): Bapak Junaidi. S.Pd., M.Si, dan pembimbing II (dua): Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si yang telah memberikan bimbingan, bantuan baik moral maupun spiritual serta motivasi dan doa yang sepenuhnya kepada penulis sampai selesainya skripsi ini. Semoga semua ini akan dibalas dengan balasan yang berlipat-ganda oleh Allah Subhanahuwata'ala, amin.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan bu Ike Sylvia, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan serta staf yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Erianjoni. S.Sos., M.Si, Ibu Erda Fitriani S.Sos., M.Si, dan Bapak Dr. Eka Vidya Putra M.Si selaku penguji yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan perhatian untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Sosiologi yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama ini.

5. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta Staf dan Karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf tata usaha FIS UNP, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Sosiologi angkatan tahun 2012 terutama M. Iqbal Munzir AM B (Cuiq), Rafli Mustaqim (aphy), Agung Putra Gala, Dean Rahmaddito, Ryan Novly (Uwo), Andang Mukti, Robet Tanjung, Khairil Boy dan Keluarga Kos Ponang B7 (Da Angga S, Vicky Mora A) serta Adik-adik satu Jurusan Sosiologi. Ucapan terimakasih spesial untuk (Rahayu Pratiwi) yang telah membantu penulis dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga atas bimbingan, bantuan dan do'a tersebut dapat menjadi amal shaleh dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Penjelasan Konseptual	16
1. Kendala Satlantas	16
2. Pengendalian Sosial	17
3. Balapan Liar	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Lokasi Penelitian.....	18
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	19
3. Informan Penelitian.....	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
a. Wawancara.....	21
b. Observasi.....	24
c. Studi Dokumen	25

5. Triangulasi Data	26
6. Teknik Analisi Data	28
a. Reduksi Data	28
b. <i>Display</i> Data.....	29
c. Penarikan Kesimpulan	29

BAB II NAGARI PARIT MALINTANG

A. Sejarah Nagari Parit Malintang	31
B. Kondisi Geografis	32
C. Kondisi Demografi	33
1. Jumlah Pendudukan	34
2. Tingkat Pendidikan	35
3. Mata Pencarian	35
a. Kesejahteraan Masyarakat	37
D. Keadaan Sosial	37
1. Agama	38
E. Satlantas Polres Padang Pariaman	39
F. Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman	42
G. Pembalap Liar dan Motor yang Dipakai	44

BAB III KENDALA SATLANTAS POLRES PADANG PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI BALAPAN LIAR DI KAWASAN KANTOR BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Area yang Luas Untuk Balapan Liar	46
B. Tidak Adanya Program Khusus	60
C. Kebocoran Informasi Razia	64
D. Keterbatasan Jumlah Personil Satlantas dalam Melakukan Razia	70
E. Hubungan dengan Masyarakat yang Longgar	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	87
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1. Jumlah Form Razia Balapan Liar yang Tertangkap Razia Satlantas Polres Padang Pariaman.....	3
Table 2. Sejarah Pemerintahan Nagari Nama-Nama Sebagian Wali Nagari Sesudah Berdirinya Nagari Parit Malintang.....	32
Table 3. Jumlah Pendudukan Nagari Parit Malintang.....	34
Table 4. Data Tingkat Pendidikan Nagari Parit Malintang	35
Table 5. Data Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Parit Malintang	36
Table 6. Data Kesejahteraan Masyarakat Nagari Parit Malintang	37
Table 7. Data Agama Masyarakat Nagari Parit Malintang	38
Table 8. Data Ranmor Dinas yang Ada di Satlantas Polres Padang Pariaman.....	41
Table 9. Daftar Nama Pembalap Liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Model Analisis Data Interaktif Dari Miles dan Huberman.	30
Gambar 2. Struktur Organisasi Satlantas Polres Padang Pariaman.	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Nama Informan	87
2. Pedoman Wawancara	90
3. Pedoman Observasi	93
4. Dokumentasi Penelitian	94
5. SK Pembimbing	99
6. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan warga negaranya senantiasa berlandaskan hukum. Hukum dalam sebuah negara bersifat mengatur dan memaksa. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹

Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di jalan raya atau umum.² Hal ini senada diungkapkan oleh Faris Hadikusuma dkk, pada dasarnya balapan liar itu sendiri adalah suatu tindakan yang sering dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar³. Artinya kegiatan ini tidak digelar di lintasan balapan resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya

¹ Agung Witoro. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kabupaten Bantul. *Jurnal*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

² <http://putrabadhegracingteam.blogspot.co.id/2013/03/balapan-liar.html>. [Internet] Diakses tanggal 26 Januari 2016.

³ Faris Hadikusuma, Bambang Sudjito, Milda Istiqomah. “Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balapan Liar oleh Kalangan Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologi)”. *Jurnal*. Banyuwangi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

sudah mulai lengang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda.

Kegiatan seperti ini sangat bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal (115) yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya dilarang : (a) mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21. (b) berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Selanjutnya Pasal (297), menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (115) huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.⁴

Kegiatan balapan motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, *knalpot* yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Merujuk pada Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, *knalpot* dan kedalaman alur ban. Minimnya kelengkapan perlengkapan sepeda motor dapat membahayakan keselamatan pengendara dan pengendara lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Balapan liar juga terdapat di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini data mengenai kasus balapan liar, motor trondol⁵ yang terjaring razia oleh Satlantas Polres Padang Pariaman dimulai pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Karena pada tahun tersebut polisi gencar mengadakan razia karena perpindahan kantor Polres Padang Pariaman yang baru dipindahkan dari Kota Pariaman ke Parit Malintang menjadi Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 1. Jumlah Form Razia Balapan Liar yang Tertangkap Razia Satlantas Polres Padang Pariaman

No	Tahun	Jumlah Kasus Balapan Liar yang Tertangkap Razia.
1	2014	347 set/lembar surat tilang
2	2015	627 set/lembar surat tilang
Jumlah		974 set/lembar surat tilang

Sumber: Hasil Wawancara dengan Baurtilang Satlantas Polres Padang Pariaman Tahun 2016

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir kasus balapan liar mengalami peningkatan. Yaitu: (a) pada tahun 2014 berjumlah 347 set/lembar, dan (b) tahun 2015 berjumlah 627 set/lembar. Berdasarkan penjelasan data di atas, kasus balapan liar terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 29% dibandingkan jumlah kasus balapan liar yang terjadi pada tahun 2014.

Adapun data hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Satlantas Padang Pariaman mengenai kasus balapan liar khusus di lokasi penelitian yaitu

⁵ Motor trondrol bisa disebut juga dengan motor modifikasi merupakan motor yang telah dirubah dari satu atau bagian seluruh parts motor dari keadaan standar yang bisa menghilangkan fungsinya, menambah perfoma motor dan juga bisa menjadi penanda sebuah identitas dari sebuah motor

Kantor Bupati Padang Pariaman. Pada razia terakhir yang dilakukan pada sore hari Minggu Tanggal 24 Januari 2016, pelaku beserta motor kendaraanya ditangkap sebanyak 40 unit kendaraan.⁶ Di bagian yang berbeda yaitu SPKT Polres Padang Pariaman, peneliti memperoleh data barang bukti sitaan R2 (roda dua/motor) dari Satlantas Polres Padang Pariaman mengenai motor trondol dan *knalpot racing* sebanyak 402 unit. Jumlah ini setiap saat akan ada penambahan dan pengurangan karena masa penahanan selama 3 (tiga) bulan.⁷

Pelaku kasus pelanggaran lalu lintas yang ditindak tilang ini adalah remaja laki-laki yang berumur 13 tahun sampai 23 tahun. Status mereka pelajar, mahasiswa dan pengangguran.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan. Pasal 115 mengenai batas kecepatan. Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana.⁹

Satlantas Polres Padang Pariaman sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini telah berupaya dalam mencegah terjadinya balapan motor liar tersebut dengan berbagai cara di antaranya yaitu: (a) *Preventif* yaitu pencegahan yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-

⁶ Wawancara Dengan Bripka Richi Fernandez Pada Tanggal 24 Juni 2016.

⁷ Wawancara Dengan Briptu Fadly Adi Putra Pada Tanggal 23 Juni 2016.

⁸ Wawancara dengan Bripka Richi Fernandez pada Tanggal 16 Maret 2016.

⁹ Full text of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) .htm. [Internet] Diakses tanggal 26 Januari 2016.

sekolah di samping itu berpatroli dan mengatur lalu lintas pada setiap hari. (b) *Pre-emptif* yaitu penindakan terhadap orang yang melanggar, diawali dengan memberi nasehat atas kesalahan yang dilakukan dan penindakan tilang.

Dalam pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dilakukan pada jenjang pendidikan formal yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dimulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Penyuluhan dan sosialisasi tersebut dilakukan 4 (empat) kali dalam satu bulan. Satlantas juga melakukan MoU atau nota kesepahaman ke sekolah yang ditetapkan¹⁰. Di samping itu, Polisi gencar melakukan sistem patroli (*hunting*) terhadap pengendara motor yang memakai *knalpot* tidak standar atau *racing*. Selanjutnya polisi juga mendatangi lokasi tempat balapan liar dan menangkap pelaku balapan liar setelah mendapatkan informasi dari petugas yang telah ditugaskan untuk memata-matai dan menandai pembalap liar di lokasi balapan liar dengan berpakaian baju bebas, dan informasi dari salah satu warga masyarakat juga diterima oleh petugas.¹¹

Unit Dikyasa (pendidikan dan rekayasa) Satlantas Polres Padang Pariaman dalam upaya mengatasi balapan liar bertugas membuat program sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan rekayasa lalu lintas. Dalam pelaksanaan sosialisasi anggota Satlantas juga menggunakan kostum badut agar menarik perhatian masyarakat untuk

¹⁰ Wawancara dengan Brigadir Peren Copra (Dikyasa Satlantas Polres Padang Pariaman) Tanggal 16 Maret 2016.

¹¹ Wawancara dengan Bripka Richi Fernandes (Baurtilang Satlantas Polres Padang Pariaman) Tanggal 16 Maret 2016.

berpartisipasi agar mematuhi aturan lalu lintas. Sosialisasi ini dilakukan di sekolah, pusat keramaian yaitu pasar tradisional dan pos polisi sambil mengatur arus lalu lintas.

Peran Satlantas untuk mencegah dan menanggulangi balapan liar juga merambah lingkungan pendidikan formal. Sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) menjadi fokus perhatian kepolisian karena banyak pelaku balap liar yang terjaring razia masih berstatus pelajar. Petugas kepolisian juga melakukan razia di dalam lingkungan sekolah, dengan cara mendata siswa yang membawa motor ke sekolah harus memakai helm standar, kaca spion dan membawa STNK. Bagi siswa yang sudah berumur 17 tahun ke atas diperintahkan untuk membuat SIM. Anggota Satlantas juga memeriksa *knalpot* setiap kendaraan terparkir di parkir sekolah. kendaraan yang memakai *knalpot racing* langsung diproses di tempat dengan memanggil siswa yang mempunyai kendaraan dan menyuruh mengganti dengan *knalpot* standar, karena pada umumnya kendaraan pembalap liar ditandai dengan memakai *knalpot racing* dan modifikasi.

Anggota Satlantas yang bertugas dalam Unit Turjagwali sering melakukan patroli dan mendatangi tempat yang diduga sebagai lokasi balapan liar. Upaya pencegahan berupa pengarahan dan penangkapan dilakukan guna menanggulangi balapan liar telah dilakukan agar masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak melakukan balapan liar. Dalam Pelaksanaan razia balapan liar dilakukan apabila telah dikeluarkannya surat perintah dari Kapolres

dan Kasatlantasi Polres Padang Pariaman sebagai atasan.¹² Balapan liar yang sering dilakukan pada akhir pekan dan hari libur petugas kepolisian hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh petugas kepolisian. Balapan liar tersebut juga diakui oleh petugas kepolisian dilakukan tidak secara berkelanjutan terus-menerus tetapi dengan musim-musiman, yang diartikan sebagai balapan liar itu akan berhenti dilakukan setelah dilakukan razia atau pembubaran di lokasi tersebut, namun jangka waktu berhentinya tidak berlangsung lama.

Dalam melakukan razia balapan liar, anggota Satlantas melakukan dengan cara yaitu razia stasioner (tetap) yang razia yang dilakukan secara terus menerus dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian cara razia yang selanjutnya dinamakan razia anti sistem, dimaksudkan sebagai razia yang dilakukan tanpa prosedur atau sistem. Dalam pelaksanaannya Jangka atau durasi waktu razia tidak ditargetkan atau ditetapkan, jika balapan liar terjadi pada saat tertentu anggota Satlantas langsung turun ke lapangan.¹³

Dalam melakukan razia, adapun standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi. Secara nasional tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia baik petugas kepolisian melaksanakan razia/pemeriksaan pada siang hari maupun malam hari. Hanya terdapat sedikit perbedaan yakni, (a) menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan atau razia, (b)

¹² Ipda. Afdal (49 Tahun). Kanit Turjagwali Satlantas Polres Padang Pariaman, Wawancara dilakukan pada 24 Oktober 2016.

¹³ Ipda. Afdal (49 Tahun). Kanit Turjagwali Satlantas Polres Padang Pariaman, Wawancara dilakukan pada 24 Oktober 2016.

memasang lampu isyarat bercahaya dan, (c) memakai rompi yang memantulkan cahaya.¹⁴ Khusus untuk melakukan razia balapan liar anggota Satlantas langsung turun ke lokasi balapan liar dan memblokir akses jalan agar pembalap liar tidak berhasil kabur dan menghindari razia petugas. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan, khususnya pemuda karena akibat dari perbuatan balapan liar sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain.¹⁵

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti mendapati bahwa balapan liar tersebut dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu sore. Pembalap liar tersebut banyak berasal dari remaja laki-laki. Hal ini juga diakui oleh masyarakat yang mengetahui dan tinggal cukup berdekatan dengan lokasi balapan liar, bahwa pembalap liar tersebut mengendarai sepeda motor dengan cara berkelompok atau berombongan pada sore hari dengan kecepatan yang cukup kencang.¹⁶ Berdasarkan hasil pengamatan tersebut bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian tidak berhasil membuat jera pembalap liar.

Lokasi balapan liar itu dilakukan di jalan yang tidak biasanya dilakukan balapan liar pada umumnya. Lokasi balapan liar dalam fokus penelitian ini terjadi di jalan tepat di depan Kantor Bupati Padang Pariaman. Kantor ini juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Jalan tersebut memiliki panjang kurang lebih 200 meter yang memiliki 2 (dua) jalur. Biasanya waktu terjadinya balapan liar di lokasi tersebut tidak dilakukan pada malam hari

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb937db5c0b6/aturan-pelaksanaan-razia-kendaraan-bermotor> diakses pada 21 Agustus 2016

¹⁵ Wawancara dengan Bripka Fernandes (33 Tahun) pada tanggal 21 September 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Nasrul Tanjung (43 Tahun) pada 27 Oktober 2016

atau dini hari melainkan pada sore hari. Akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu sore balapan liar tersebut dimulai pada pukul 17:00-18:30 WIB.

Perilaku balapan liar ini juga memberikan efek negatif pada masyarakat di sekitar lokasi terjadinya balapan liar tersebut. Masyarakat mengaku suara bising yang berasal dari *knalpot* sepeda motor tersebut dapat memecakkan telinga. Suara tersebut dihasilkan dari *knalpot racing* yang mereka pakai dalam balapan liar. Selanjutnya para orang tua juga merasakan ketakutan terhadap perilaku pembalap liar yang mengendarai motornya dengan kebut-kebutan setelah mengadakan balapan liar yang nantinya dapat menyebabkan terjadi kecelakaan sehingga mengancam keselamatan mereka dan orang lain. Bukan itu saja, para orang tua juga merasa cemas terhadap anak-anaknya yang nantinya juga ikut dalam balapan liar tersebut.¹⁷ Selanjutnya masalah yang dapat disebabkan oleh kasus seperti ini juga telah banyak diberitakan banyak media masa dalam kondisi tertentu pembalap liar dapat melakukan tindak kejahatan seperti tabrak lari, menjambret, curanmor dan ajang dalam perjudian.

Studi relevan yang terkait dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Faris Hadikusuma, Bambang Sudjito dan Milda Istiqomah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balapan Liar oleh Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis). Di dalam penelitian tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kemitraan kepolisian dan masyarakat dalam pencegahan balapan liar yaitu: kendala secara

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Akhirman Tanjung (53 Tahun) Pada Tanggal 26 Juni 2016

substansial yang berasal (dari pihak kepolisian dan dari pihak masyarakat). Kendala struktural yang disebabkan belum ada suatu kemitraan yang bersifat formal antara polisi dan masyarakat. Kendala managerial ditandai dengan kurangnya informasi antar masyarakat, dan terakhir kendala kultural karena ditemukan bahwa hukuman yang diberikan tidak membuat pembalap liar jera (internal dan eksternal).¹⁸

Berdasarkan studi relevan di atas, dapat dijelaskan bahwa balapan liar tetap terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh adanya beberapa kendala yang dihadapi yang dialami oleh masyarakat dalam menanggulangi balapan liar. Sehingga kasus balapan liar dapat mengalami peningkatan. Kaitannya studi relevan dengan penelitian ini adalah balapan liar yang terjadi di lokasi penelitian juga terdapat adanya kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melihat bahwa perlu dilakukan kajian yang mendalam dan ilmiah mengenai kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar. Sebelumnya belum ada penelitian tersebut yang dilakukan di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman”*

¹⁸Faris Hadikusuma, Bambang Sudjito dan Milda Istiqomah. Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis). *Jurnal*. Universitas Brawijaya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi fokus penelitian pada kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di kawasan kantor Kabupaten Padang Pariaman. Kasus balapan liar mengalami peningkatan padahal sudah dilakukan upaya preventif dan represif (pre-emptif) untuk menekan angka kasus balapan liar tersebut. Namun kenyataannya hal tersebut belum berhasil, hal ini diperkirakan karena ada kendala yang dihadapi.

Dari batasan masalah di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan literatur pada mata kuliah sosiologi hukum dan mata kuliah perilaku menyimpang.
2. Secara praktis, ada juga manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam membuat kebijakan.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan Teori anomie yang berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menyimpang. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Robert King Merton pada sekitar tahun 1930-an, di mana konsep anomie itu sendiri pernah digunakan oleh Emile Durkheim dalam analisisnya tentang *suciede anomique*.¹⁹ Pada tahun 1938 Robert King Merton mengadopsi konsep anomie yang didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya perbedaan antara *cultural goals*²⁰ dan *institutionalized means*²¹ sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Perspektif ini dikenal dengan teori ketegangan (*strain theory*), yang dikembangkan pada tahun 1959-1969. Menurutnya orang yang mengalami ketegangan cenderung merasakan anomie, yaitu suatu perasaan ketiadaan norma (*normlessness*), karena norma umum (pekerjaan dan pendidikan) nampaknya tidak mengantarkan mereka kemana-mana. Maka, mereka mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi diri dengan norma umum. Mereka bahkan dapat merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem dan peraturannya nampak tidak sah.²²

¹⁹J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 110.

²⁰ *Cultural goals* adalah tujuan-tujuan status atau kultural yang dicita-citakan oleh masyarakat.

²¹ *Institutionalized means* merupakan akses atau cara kelembagaan yang sah (sekolah, pekerjaan formal, kedudukan politik, dsb) sebagai sarana mencapai tujuan.

²²James M. Henslin. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi* Edisi 6 Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Hal 159.

Dalam sumber yang berbeda, analisis Merton (1968) atas hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomie. Merton mendefinisikan *kebudayaan* sebagai “sekumpulan nilai-nilai normatif terorganisir yang mengatur perilaku yang lazim bagi para anggota suatu masyarakat atau kelompok” dan *struktur sosial* sebagai “sekumpulan *hubungan-hubungan sosial* terorganisir yang dengan berbagai cara menyiratkan para anggota masyarakat atau kelompok”. Anomie terjadi “bila ada pemisahan tajam antara norma-norma dan tujuan-tujuan budaya dan kemampuan para anggota kelompok terstruktur secara sosial untuk bertindak selaras dengannya”. Yakni, karena posisinya di dalam struktur sosial masyarakat, orang-orang tertentu tidak mampu bertindak selaras dengan nilai-nilai normatif. Kebudayaan meminta tipe perilaku yang tidak diperbolehkan terjadi, oleh struktur sosial.²³ Dalam analisis ini Merton melihat struktur-struktur (dan budaya), tetapi dia tidak begitu berminat pada fungsi struktur-struktur itu. Lebih tepatnya, konsisten dengan paradigma fungsionalnya, dia berminat terutama dengan disfungsi-disfungsi. Secara lebih spesifik, Merton mengaitkan anomie dengan penyimpangan sehingga berargumen bahwa pemisahan di antara kebudayaan dan struktur mempunyai konsekuensi disfungsional yang menyebabkan penyimpangan di dalam masyarakat.²⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anomie merupakan suatu keadaan atau situasi di mana kondisi sosial/situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi cara-cara yang sah

²³George Ritzer. 2012. Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 436

²⁴ *Ibid.*, hlm 437

untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut jumlahnya sedikit. Akibat dari keterbatasan akses, makna, dan ketidakmampuan mencapai tujuan dan nilai, maka mengakibatkan situasi anomie.

Teori Robert King Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian anomie mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai (*illegitimate means*) dengan cara-cara yang telah ditetapkan (*legitimate means*). Aspek seperti ini disebabkan struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.

Robert King Merton mengemukakan ada 5 (lima) reaksi orang terhadap tujuan budaya dan cara yang terinstitusionalisasi yaitu:

1. Konformitas (kepatuhan) yaitu penggunaan yang secara sosial dibenarkan untuk mencapai tujuan budaya.
2. *Innovator* merupakan salah satu dari empat reaksi yang mewakili anomie dan dikatakan jalur menyimpang. *Innovator* yang berarti orang yang menerima tujuan masyarakat namun menggunakan cara tidak sah dalam upaya meraihnya.

3. *Ritualism* (ritualisme) yaitu orang yang putus asa dan menyerah dalam upaya meraih tujuan budaya. Namun mereka masih berpegangan pada peraturan perilaku konvensional.
4. *Retreatism* (penarikan diri) merupakan keadaan di mana para warga masyarakat menolak tujuan budaya maupun sarana institusional yang telah disediakan untuk mencapai tujuan sebagai contoh pemabuk dan lain sebagainya.
5. *Rebellion* (pemberontakan) adalah suatu keadaan di mana tujuan budaya dan sarana institusional yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk menggantikan tujuan yang ada atau mengubah seluruhnya.

Teori Anomie yang dikemukakan oleh Robert King Merton dipilih untuk menganalisis penelitian ini. Kaitan permasalahan penelitian dengan teori bahwa balapan liar terjadi akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga individu-individu (pembalap liar) yang mengalami tekanan dan akhirnya melakukan balapan liar. Ketidaksesuaian atau timbulnya perbedaan antara tujuan struktur/budaya dan sarana, akses yang tersedia juga menyebabkan penyimpangan sebagai akibat adanya struktur di dalam masyarakat. Pembalap liar yang merasakan ketegangan cenderung merasakan anomie yaitu suatu perasaan ketiadaan norma sehingga pembalap liar mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi diri dengan norma umum. Anomie juga terjadi akibat adanya pemisahan yang tajam antara kebudayaan (nilai normatif), struktur sosial (hubungan-hubungan sosial) hal ini menjadi fokus Merton dalam analisisnya

tentang hubungan antara kebudayaan, struktur dan anomie. Kemampuan para anggota kelompok terstruktur secara sosial yang tidak selaras dengan posisi orang-orang tertentu dengan kebudayaan juga mengakibatkan penyimpangan. Secara tidak langsung kebudayaan menyebabkan penyimpangan itu terjadi, karena dalam analisisnya Merton mengaitkan anomie dengan pemisahan kebudayaan dan struktur yang melahirkan disfungsional dan tidak melihat fungsi dari struktur-struktur yang ada dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini 5 reaksi pembalap liar terhadap tujuan budaya dan cara yang melembaga dan diterima oleh masyarakat yang dikemukakan Merton digunakan untuk melihat penyimpangan yang diakibatkan oleh hubungan kebudayaan dan struktur yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dan pemilihan teori ini, peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar yang ada di lokasi penelitian.

F. Penjelasan Konseptual

1. Kendala Satlantas

Kendala dalam ruang lingkup masyarakat diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran dan kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.²⁵ Dalam kaitan kehidupan bernegara Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

²⁵ <http://m.artikata.com/arti-334209-kendala.html> [internet] diakses tanggal 3 desember 2016

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁶ Satlantas merupakan salah satu bagian dari kepolisian.

Jadi, Kendala Satlantas adalah hambatan, rintangan yang meliputi faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran dan kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan suatu usaha yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Satlantas untuk menanggulangi balapan liar.

2. Pengendalian Sosial

Menurut Peter L. Berger (1978), yang dimaksud pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Soerjono soekanto (1981) yang dimaksud pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.²⁷ Dalam penelitian ini menanggulangi balapan liar dapat diartikan sebagai wujud pengendalian sosial, karena dalam menanggulangi balapan liar pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya baik yang terencana atau tidak terencana dengan maksud untuk mengajak, membimbing dan memaksa pembalap liar untuk mematuhi nilai-nilai, kaidah-kaidah, hukum yang berlaku dalam masyarakat.

²⁶ Andi Lestari Septianti. 2014. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam Media Internet Oleh Kepolisian Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

²⁷ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 132.

3. Balapan liar

Balapan liar adalah kegiatan beradu kecepatan dengan sepeda motor secara ilegal yang dilakukan tidak pada arena balap. Balapan liar dilakukan di jalan raya, tempat parkir stadion, serta tempat-tempat lain yang memungkinkan sebagai tempat mengadu kecepatan. Balapan liar umum menganut peraturan seperti *drag bike* diman dua motor dipacu di lintasan sepanjang 201 meter. *Drag bike* adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan di dalam sebuah lintasan pacu aspal yang tertutup yang terdiri dari dua buah jalur lurus sejajar dengan panjang yang sama.²⁸ Dalam penelitian ini balapan liar diartikan sebagai kegiatan beradu kecepatan dengan sepeda motor yang dilakukan di tempat umum seperti jalan raya yang tidak resmi atau tanpa izin pihak yang berwenang.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut juga menjadi target razia balapan liar kepolisian. Di samping itu aktivitas balapan liar yang terjadi meresahkan warga sekitar. Untuk mencapai lokasi penelitian harus melewati pemukiman masyarakat sepanjang jalan dan sekolah-sekolah yang ada di dekat lokasi balapan liar ini.

²⁸ Dhanang Sigit Tri P. 2010. Persepsi Masyarakat Terhadap Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul). *Jurnal*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, hal tersebut diarahkan pada latar individu secara holistik atau secara utuh.²⁹ Pendekatan kualitatif juga ditunjang dengan data yang mendetail mencakup data tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya atau hubungannya dengan manusia lainnya, dan pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya.³⁰

Peneliti memilih pendekatan ini karena ingin mendapatkan data penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar. Data dan temuan yang dimaksud adalah berupa kata-kata baik tidak tertulis maupun tertulis, kegiatan atau usaha yang dilakukan serta dilengkapi dengan pengamatan yang dilakukan terkait dengan topik penelitian.

Tipe penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) merupakan tipe penelitian yang dapat mengungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu

²⁹Lexy J Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset. Hlm 4

³⁰A. Muri Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian Dasar- dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: UNP Press. Hlm 53

situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga, satu peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat menghayati, memahami dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.³¹

Adapun tujuan tipe penelitian ini yang dapat menunjang penelitian ini yaitu mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab-akibat, bersifat eksploratif untuk mencari keterangan-keterangan apa penyebab terjadinya masalah, bagaimana memecahkannya yang sifatnya mendalam pada satu unit peristiwa.³² Peneliti memilih tipe penelitian studi kasus karena ingin mengungkap secara mendalam terkait dengan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan data atau keterangan tentang keadaan diri orang lain, atau situasi-situasi lingkungannya. Adapun pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan kriteria informan yang kompeten dalam hal data atau informasi tertentu yang disebut *purposive sampling*.³³ Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah (1) Anggota Kepolisian Satlantas Polres Padang Pariaman di Kantor Satlantas Polres Padang Pariaman Lubuk Alung. (2)

³¹ *Ibid.*, *Metodologi Penelitian Dasar-dasar Penyelidikan Ilmiah*..... Hlm 68-69

³² Arief Subyantoro dan FX. Suwanto. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

³³ *Ibid.*, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*..... Hlm 99

pembalap liar di kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman, dan (3) Orang tua pembalap liar (4) warga masyarakat yang tinggal di dekat lokasi balapan liar.

Informan yang berasal dari, (1) Anggota Kepolisian Satlantas Polres Padang Pariaman (Kasatlantas Polres Padang Pariaman, Kepala Unit Rajawali Satlantas Polres Padang Pariaman, Kepala Urusan Binaan Opsional Satlantas Polres Padang Pariaman, Kepala Unit Dikyasa Satlantas Polres Padang Pariaman, Kepala Unit Brigadir Motor Satlantas Polres Padang Pariaman, Kepala Unit Lakalantas Polres Padang Pariaman, Bamin Lakalantas Satlantas Polres Padang Pariaman, Baurtilang Satlantas Polres Padang Pariaman, Anggota Dikyasa Polres Padang Pariaman, Anggota Brigadir Motor Satlantas Polres Padang Pariaman, Anggota Unit Lakalantas Satlantas Polres Padang Pariaman dan Anggota Sentra Pelayanan Terpadu Polres Padang Pariaman), (2) Pembalap liar di kawasan Kantor Bupati Padang Pariaman, (3) Orang tua pembalap, (4) Tokoh Masyarakat (Wali Nagari Parit Malintang dan Wali Korong Pasa Dama), dan (5) Masyarakat yang tinggal di dekat kawasan Kantor Bupati Padang Pariaman Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 40 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah metode wawancara. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan atau pendapat,

sikap atau tanggapan, keterangan dan sebagainya) dari suatu pihak tertentu.³⁴ Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara seksama, memahami, mendengar, dan mencatat segala sesuatu mengenai permasalahan serta untuk mendapatkan data yang detail mengenai kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan terstruktur, artinya wawancara yang dilakukan secara tatap muka dan dilakukan secara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan secara intensif dan berulang-ulang untuk mendapatkan data yang lengkap dan detail dengan pertanyaan yang telah disusun.³⁵ Alat yang digunakan dalam proses wawancara adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara agar fokus dalam prosesnya. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data secara detail mengenai kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman. wawancara dilakukan kepada beberapa orang informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Padang Pariaman secara berulang-ulang dan mendalam yang sedang bertugas di pos patroli. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Anggota Satlantas yang piket di Kantor Satlantas Polres Padang Pariaman

³⁴ *Ibid.*, Metode dan Teknik Penelitian Sosial..... Hlm 97

³⁵ Burhan Bungin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 156-158

untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan wawancara peneliti juga menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dikembangkan dari pedoman wawancara yang dipersiapkan sebelum ke lapangan. Jawaban dari informan akan diikuti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam, sehingga diperoleh informasi sedetail mungkin dari para informan. Hasil wawancara dicatat kembali setelah wawancara selesai. Setelah proses pencatatan selesai barulah dilakukan interpretasi dan analisis data. Data di lapangan tersebut disusun secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian yang akhirnya mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menemui informan di lokasi dimana informan tersebut melakukan aktivitas, termasuk menemui pembalap liar di lokasi balapan liar. Kesulitan yang peneliti hadapi dalam melakukan wawancara yaitu ketika peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku balapan liar, mereka awalnya menolak untuk diwawancarai. Setelah peneliti meyakinkan bahwa hasil wawancara tidak akan disalahgunakan dan identitas pembalap liar dirahasiakan barulah mereka bersedia untuk diwawancarai. Untuk menemukan dan melakukan wawancara dengan pembalap liar yang lain, peneliti diberitahu oleh pembalap liar yang diwawancarai sebelumnya.

Adapun kemudahan dalam melakukan wawancara yaitu peneliti mudah menemukan informan yang akan diwawancarai, sehingga dalam mencari informan untuk diwawancarai peneliti tidak menemukan kesulitan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya peneliti memberitahukan kepada informan terlebih dahulu maksud dan tujuan melakukan wawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menyaksikan sesuai dengan permasalahan penelitian yang kemudian data tersebut dicatat dan dikumpulkan. Dalam melakukan observasi peneliti berada di lokasi penelitian dengan cara melihat, memahami, mendengarkan segala sesuatu yang terjadi.

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, yaitu selama pengumpulan data peneliti mendatangi tempat yang diamati dan tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari informan. Ini berbeda dengan observasi partisipasi aktif, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.³⁶ Alat yang digunakan dalam proses observasi

³⁶ A. Muri Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian Dasar- dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: UNP Press. Hlm 292

ini adalah catatan lapangan dan alat rekam pandang yaitu kamera video untuk memudahkan peneliti merekam peristiwa dan kegiatan yang diamati.

Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati dan melihat aktivitas pembalap liar. Peneliti juga mengamati kapan waktu dan di mana lokasi balapan liar dilakukan. Peneliti juga mengamati dan mencatat upaya yang sedang dilakukan oleh Satlantas Polres Padang Pariaman. Dalam melakukan observasi peneliti tidak menemukan kesulitan.

c. Studi Dokumen

Melengkapi data penelitian mengenai kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman, peneliti menggunakan studi dokumen. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Data yang diperoleh digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.³⁷ Studi dokumen ini berupa data tentang kondisi geografis, demografis, buku-buku, artikel dan foto-foto untuk mempertegas hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Satlantas Polres Padang Pariaman, Kantor Wali Nagari Parit Malintang dan jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian.

³⁷Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 158

Adapun media yang digunakan peneliti adalah kamera *handphone*, dan alat perekam di *handphone*, sehingga penelitian mengenai kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar ini bisa dilakukan lebih mendalam. Selain observasi dan wawancara dilakukan peneliti mendapatkan dokumen jumlah form pembalap liar yang ditindak dengan tilang dari Kantor Satlantas Polres Padang Pariaman dan peneliti juga mendapatkan foto yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian penelitian ini peneliti juga mendapatkan data arsip dari Nagari Parit Malintang.

5. Triangulasi Data

Penelitian yang akan dilakukan harus memiliki kebenaran dan keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data penelitian maka dilakukan triangulasi data. Dalam melakukan triangulasi, peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Melalui teknik triangulasi ini akan memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya dan selengkap-lengkapannya.³⁸

Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Anggota Satlantas, pembalap liar, orang tua pembalap dan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan tersebut telah dicatat dalam pedoman wawancara. sehingga peneliti memperoleh jawaban yang berbeda-beda dari pertanyaan yang sama. Jawaban pertanyaan tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan sehingga menjadi data yang absah.

³⁸Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 60

Agar memperoleh data yang absah maka peneliti melakukan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber artinya adalah peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Triangulasi metode yaitu membandingkan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu adalah melakukan wawancara pada waktu yang berbeda-beda.

Dalam melakukan triangulasi sumber, peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan data yang bervariasi terkait dengan penelitian mengenai kendala Satlantas dalam menanggulangi balapan liar. Triangulasi metode peneliti lakukan dengan cara membandingkan temuan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesesuaian antara ketiga metode tersebut data yang didapatkan memang benar-benar absah. Sedangkan triangulasi waktu peneliti lakukan dengan cara mewawancarai informan yang sama dengan waktu yang berbeda. Hal tersebut dilakukan agar keterangan yang didapatkan tidak direayasa oleh informan dan memang itu apa adanya.

Melalui teknik triangulasi ini akan memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya dan selengkap-lengkapnyanya, karena setiap metode misalnya wawancara, observasi dan studi dokumen, maka metode yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan hingga tanggapan terhadap realitas menjadi lebih sahih, dengan demikian peneliti dapat memperoleh gambaran

yang lebih mendalam mengenai balapan liar di Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data secara terpola dalam beberapa kategori. Data yang telah didapatkan dari penelitian di lapangan akan dikelompokkan dengan baik sehingga akan sistematis dan terstruktur dengan baik. Data yang didapatkan melalui hasil wawancara kemudian dikumpulkan sehingga menjadi berkelompok-kelompok. Data tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur yang disajikan secara deskriptif. Dalam melakukan analisis ini peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh dari awal penelitian sampai pada akhir penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁹ Ketiga komponen tersebut dilakukan secara berurutan. Adapun analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data.

Laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian. laporan ini perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mencari temanya. Data yang didapat dari lapangan

³⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 85-88

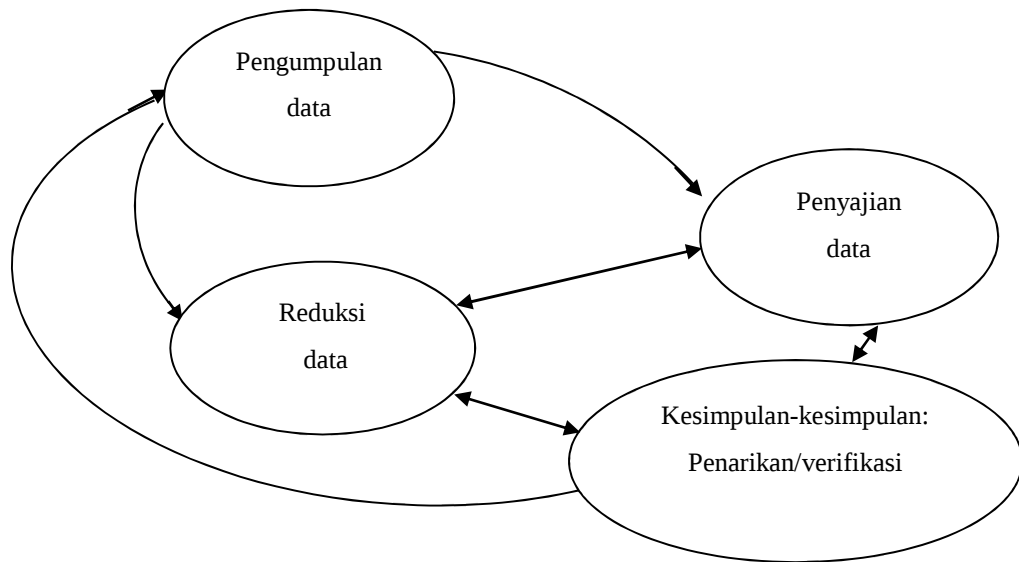
kemudian ditulis dengan rapi, rinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data.

b. Display data.

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk tulisan atau tabel. Dengan melakukan display data dapat memberikan gambaran menyeluruh sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisis mengenai tema penelitian. Pada tahap *display* data ini, peneliti berusaha menyimpulkan melalui data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi sebelumnya. Agar didapat data-data yang akurat, data-data dikelompokkan ke dalam tabel dan tabel ini akan membantu peneliti dalam melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian atau penyajian data ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap masalah penelitian.

c. Penarikan kesimpulan.

Peneliti menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting. Jika dirasa sudah sempurna, maka hasil penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir mengenai kendala Satlantas Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi balapan liar di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 1. Skema Model Analisis Data Interaktif Dari Miles dan Huberman⁴⁰.

⁴⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UI Press.1992) Hlm 20.